

**INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
KOTA PAREPARE TAHUN 2012**

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Tanggal 4 Januari 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat, maka berikut ini diinformasikan mengenai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Parepare Tahun 2012.

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Parepare Tahun 2012 ini adalah merupakan ringkasan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Ruang lingkup pembahasannya mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

A. GAMBARAN UMUM KOTA PAREPARE

Kota Parepare secara geografis terletak pada jalur perlintasan transportasi darat maupun laut untuk bagian tengah Propinsi Sulawesi Selatan, baik arah utara-selatan maupun arah timur-barat. Sesuai dengan arahan pengembangan wilayah, maka Kota Parepare ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Antar Wilayah (PPAW) untuk bagian tengah Propinsi Sulawesi Selatan. Pemaknaan pusat pelayanan antar wilayah diterjemahkan oleh Pemerintah daerah Kota Parepare dalam visinya sebagai Bandar Madani dengan Masyarakat yang Mandiri, religius dan berkomitmen Lingkungan.

Dalam rencana strategis pembangunan daerah Kota Parepare secara garis besar dapat digambarkan sebagai sebuah kota dengan fungsi dan peran yang perlu didukung dengan berbagai kebijakan-kebijakan pembangunan dalam menunjang perwujudan dan pencapaian visi yang telah ditetapkan tersebut. Sehingga dengan demikian, maka fasilitas pelayanan antar wilayah banyak dikembangkan di kota ini.

Dengan luas 99,33 Km², Kota Parepare berada pada posisi 3°57'39" - 4°04'49" Lintang Selatan dan 119°36'24" - 119°43'40" Bujur Timur, dengan kondisi topografi secara umum terbagi dalam 2 (dua) morfologi, yakni; dataran dan perbukitan. Bentuk lahan dataran terletak di wilayah pesisir pantai, dan secara umum merupakan daerah yang cukup padat, pusat aktifitas kota, disebut sebagai Kota Bawah dengan luas sekitar 30% dari luas wilayah. Sementara itu, sekitar 70% dari luas wilayah lainnya adalah lahan perbukitan yang merupakan wilayah dominan di Kota Parepare, serta memanjang dari arah utara selatan dan timur barat. Wilayah ini merupakan wilayah pengembangan yang sifatnya terbatas, karena ada sebagian kondisi topografi yang mempunyai tingkat kelerengan yang curam. Secara administratif, Kota Parepare terbagi dalam 4 (empat) kecamatan dan 22 (dua puluh dua) kelurahan.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Kota Parepare tahun 2012 sebanyak 181.734 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 91.004 jiwa dan perempuan sebesar 90.730 jiwa. Adalah Kecamatan Soreang dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 63.721 jiwa. Disusul kemudian oleh Kecamatan Bacukiki Barat sebanyak 51.818 jiwa, Kecamatan Ujung sebanyak 47.425 jiwa, dan Kecamatan Bacukiki sebanyak 18.770 jiwa. Dengan bertambahnya jumlah penduduk berdampak pada angka kepadatan penduduk Kota Parepare yang meningkat dari 1.314 jiwa/km² pada Tahun 2011 menjadi 1.829 jiwa/km² pada tahun 2012. Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terbesar

adalah Kecamatan Soreang, yaitu 6.220 jiwa/km², dan yang terendah adalah Kecamatan Bacukiki, yakni sebesar 281 jiwa/km².

Jumlah penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun ditambah 65+ tahun) adalah 60.964 orang, penduduk usia 15-64 tahun berjumlah 120.770 orang yang disebut dengan usia produktif. Sementara itu, Penduduk Usia Kerja (penduduk yang berumur 15 tahun ke atas) mencapai 89.044 orang yang terdiri 55.230 orang Angkatan Kerja dan 33.814 orang Bukan Angkatan Kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2010 tercatat sebesar 11,85 persen pada tahun ini turun menjadi 7,97 persen. Dilihat dari status pekerjaan utamanya, 46,49 persen penduduk Kota Parepare merupakan buruh/karyawan (termasuk di dalamnya pegawai pemerintahan) dan yang paling sedikit yaitu pekerja bebas di sektor pertanian (0,13 persen).

Berdasarkan lapangan usaha, sebagian besar penduduk Kota Parepare bekerja di sektor perdagangan, hotel dan restoran yang berjumlah sekitar 37,33 persen dari jumlah penduduk yang bekerja. Sektor lainnya yang menyerap tenaga kerja cukup besar adalah sektor jasa perorangan dan kemasyarakatan, yaitu sebesar 31,45 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kota Parepare yang berada pada angka 7,79 persen, masih berada di atas pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yaitu sebesar 7,65 persen. Sektor bank dan lembaga keuangan mempunyai rata-rata pertumbuhan tertinggi dibandingkan sektor lainnya. Berdasarkan lapangan usaha, PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada Tahun 2011 sektor bank dan lembaga mencapai 24,85 persen, sektor bangunan 9,80 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran 8,55 persen, sektor pertambangan/penggalian 7,72 persen, angkutan dan komunikasi 6,45 persen, listrik, gas dan air bersih 5,92 persen, sektor industri pengolahan 5,53 persen, sektor jasa-jasa 4,82 persen dan sektor pertanian 3,24 persen. Dilihat berdasarkan kontribusinya dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Parepare pada Tahun 2011 sektor perdagangan, hotel dan restoran, yaitu sebesar 25,39 persen, sektor angkutan dan komunikasi 19,78 persen, sektor jasa-jasa 20,99 persen, sektor bank dan lembaga keuangan sebesar 14,94 persen, sektor bangunan sebesar 8,42 persen, sektor pertanian sebesar 6,66 persen, sektor industri pengolahan 2,21 persen, sektor listrik, gas dan air bersih 1,31 persen dan sektor pertambangan 0,30 persen.

PDRB perkapita Kota Parepare setiap tahunnya menunjukkan peningkatan. Selama tahun 2007-2011, PDRB perkapita Kota Parepare meningkat dari Rp.9.143.190,72 menjadi Rp.15.881.650,54 dengan rata-rata PDRB perkapita selama lima tahun tersebut sebesar Rp.12.559.302.

Dalam rangka mengukur keberhasilan atau kinerja pembangunan manusia Kota Parepare, maka digunakan parameter *Indeks Pembangunan Manusia* (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) dengan menggunakan 3 (Tiga) indikator yaitu:

1. Indeks Kesehatan

Indeks kesehatan yang diwakili oleh Angka Harapan Hidup (e_0) pada tahun 2011 tercatat sekitar 74,49 tahun, meningkat dibanding tahun 2010 yang besarnya sekitar 74,27 tahun. Hal ini dapat diartikan bahwa kondisi kesehatan masyarakat Kota Parepare semakin baik dalam kurun waktu 2010-2011. Jika dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup Sulawesi Selatan pada Tahun 2010 adalah sekitar 70,00 tahun sedangkan tahun 2011 sekitar 70,20 tahun.

2. Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan terdiri dari dua unsur yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah penduduk yang berumur 10 tahun ke atas. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, komponen angka melek huruf pada tahun 2011 mengalami sedikit

peningkatan dari 97,16 persen menjadi 97,17 persen. Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Parepare yang berumur 15 tahun ke atas pada tahun 2011 ini meningkat menjadi 9,76 tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2010 sebesar 9,63 tahun. Jika dibandingkan dengan 23 kabupaten/kota lainnya maka angka rata-rata lama sekolah penduduk Kota Parepare berada di atas rata-rata angka Sulawesi Selatan yang hanya sebesar 7,92 tahun.

3. Indeks Paritas / Kemampuan Daya Beli

Daya beli penduduk Kota Parepare pada tahun 2011 sekitar 644,04 ribu rupiah, sedangkan pada tahun 2010 sekitar 641,55 ribu rupiah. Sementara itu, rata-rata daya beli penduduk Sulawesi Selatan pada tahun 2011 sekitar 640,30 ribu rupiah, mengalami sedikit kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 636,60 ribu rupiah.

IPM merupakan suatu jawaban untuk menilai tingkat kinerja pembangunan manusia secara keseluruhan, dari tingkat pencapaian pembangunan manusia. Indikator ini juga secara mudah dapat memberikan gambaran tentang posisi kinerja pembangunan (output pembangunan) yang dicapai oleh suatu daerah. Makin tinggi nilai IPM suatu daerah, maka makin tinggi pula tingkat kinerja pembangunan yang dicapai wilayah tersebut.

Indeks Pembangunan Manusia Kota Parepare pada tahun 2010 sekitar 77,78 mengalami peningkatan menjadi 78,19 pada tahun 2011. Posisi IPM Kota Parepare pada tahun 2011 berada pada peringkat ke 2 (dua) dari 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan, sedangkan posisi pertama adalah Kota Makassar (79,11) dan posisi terakhir Kabupaten Jeneponto (65,27). Pada tahun 2011 posisi IPM Kota Parepare sedikit mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, dan masih lebih tinggi dari rata-rata IPM kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan (72,14). Sedangkan secara nasional, IPM Kota Parepare menduduki peringkat kesembilan belas. Berdasarkan kriteria United Nations Development Program (UNDP), nilai IPM kurang dari 51 digolongkan sedang, nilai IPM antara 51 sampai dengan 79 (51-79) digolongkan menengah dan nilai di atas 79 (>79) digolongkan tinggi. Sesuai dengan kriteria tersebut, IPM Kota Parepare tergolong IPM menengah, baik pada tahun 2010 maupun tahun 2011.

B. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Parepare Tahun 2011 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Parepare 2008-2013, dengan visi ***“Terwujudnya Parepare sebagai Bandar Madani dengan Masyarakat yang Mandiri, Religius serta Berkomitmen Lingkungan”***.

1. *Bandar Madani* adalah kondisi sebagai sebuah kota yang didalamnya berlangsung kehidupan yang sejahtera dan ber peradaban dengan dukungan sarana, prasarana dan fasilitas yang mencukupi. Citra Bandar Madani ditandai oleh pencapaian pada kesejahteraan dan peradaban yang mengkondisikan hidup yang bermartabat sesuai spirit zaman.
2. *Mandiri* adalah kondisi tatanan masyarakat yang berpendidikan, sehat, produktif, sadar kewajiban, dan berdaya. Citra mandiri ditandai oleh pencapaian kualitas manusia dalam hal pendidikan dan kesehatan, kemampuan memproduksi secara inovatif, menjalankan kewajiban sebagai warga negara dan masyarakat, serta mampu

mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan dengan potensi dan sumberdaya yang ada.

3. *Religius* adalah kondisi tatanan masyarakat yang agamis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, cinta kerukunan dan kedamaian, saling menghargai dan toleran, serta menjunjung tinggi hak-hak sesama manusia.
4. *Berkomitmen Lingkungan* adalah kondisi tatanan masyarakat yang menghargai dan cinta terhadap lingkungan sebagai tempat hidup serta efisien dan efektif dalam memanfaatkan sumberdaya alam.

Untuk mendukung visi tersebut, maka dirumuskan misi Pemerintah Kota yang diarahkan pada : *pertama*, mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat; *kedua*, mewujudkan peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat; *ketiga*, mewujudkan kecukupan sarana, prasarana, infrastruktur dan fasilitas kota; *keempat*, mewujudkan tatanan masyarakat yang berwawasan lingkungan; *kelima*, mewujudkan tatanan masyarakat yang religius, toleran, tertib dan humanis; dan *keenam*, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2008 - 2013 terdiri dari: (1) Pengembangan Parepare sebagai Kota Jasa dan Niaga; (2) Pengembangan Parepare sebagai Kota Pendidikan dan Kota Sehat; (3) Pengembangan Parepare sebagai Kota Maju; (4) Pengembangan Parepare sebagai Kota Hijau; (5) Pengembangan Parepare sebagai Kota Rohani; dan (6) Pengembangan Parepare sebagai Kota Pelayanan.

Khusus terkait dengan strategi dan arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012, diarahkan :

- a) Belanja daerah didahulukan untuk penganggaran dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat mengikat dan bersifat wajib yang secara rutin harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta pelaksanaan kewajiban kepada pihak ketiga;
- b) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
- d) Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran; dan
- e) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

C. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (DESENTRALISASI)

Untuk mengetahui penyelenggaraan urusan desentralisasi yang dilaksanakan Pemerintah Kota Parepare tahun 2012, berikut uraian capaian pelaksanaan program-program pembangunan menurut **urusan wajib** dan **urusan pilihan** yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Parepare Tahun 2008-2013.

PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB

1. Penyelenggaraan Urusan Pendidikan

Alokasi anggaran yang ditetapkan untuk Dinas Pendidikan sebagai pelaksana urusan ini sebesar Rp.216.853.909.938,- dengan realisasi Rp.189.643.558.229,- atau 87,45 persen, yang dilaksanakan dalam program dengan masing-masing kegiatannya, sebagai berikut :

- a) *Program Pendidikan Anak Usia Dini*, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan antara lain peningkatan sarana bermain yaitu penyediaan alat praktek/alat bermain bagi 10 Taman Kanak-Kanan di Kecamatan Ujung.
- b) *Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun*, dilaksanakan dalam beberapa kegiatan, antara lain : olimpiade olahraga dan lomba seni, rehabilitasi gedung sekolah (DAK), penyelenggaraan ujian nasional, penyediaan beasiswa, penyelenggaraan pendidikan gratis, pengadaan peralatan pendidikan, serta pengadaan meubelair sekolah.
- c) *Program Pendidikan Menengah*, dilaksanakan dalam beberapa kegiatan antara lain pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir, penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu, peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri, penyelenggaraan Ujian Nasional, peningkatan kesejahteraan guru, lomba kreativitas siswa SMA/SMK, penyelenggaraan uji kompetensi SMK (Praktikum luar daerah), olimpiade olahraga dan lomba seni SMA, beasiswa siswa berprestasi, pengembangan informasi pendidikan, pelatihan perluasan pemanfaatan IT untuk pendidikan SMA/SMK, serta pembangunan gedung/kantor sekolah.
- d) *Program Pendidikan Non Formal*, dilaksanakan dalam beberapa kegiatan, antara lain pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan, peningkatan sarana SKB, tuntas baca tulis Al-Quran dan Aksara, penyelenggaraan pembelajaran program paket B, penyediaan modul pembelajaran peserta program paket B setara SMP sebanyak 60 orang, pemeliharaan gedung pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), jambore pendidikan non formal dan formal, pengembangan pendidikan kecakapan hidup, penyelenggaraan PAUD terpadu, serta penyelenggaraan pembelajaran program paket C.
- e) *Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan*, dilaksanakan dalam beberapa kegiatan antara lain pelaksanaan sertifikasi pendidik sebanyak 200 orang, pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan, pelatihan kompetensi tenaga pendidik, pelatihan kompetensi tenaga pendidik, bintek pelatihan tenaga pustakawan sekolah dasar, pelatihan kompetensi tenaga pendidik, bintek pelatihan bahan ajar sekolah dasar dan bintek pelatihan pengembangan IT.
- f) *Program Manajemen Pelayanan Pendidikan*, dilaksanakan dalam beberapa kegiatan antara lain pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan, pembinaan dewan pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan melalui penilaian angka kredit jabatan fungsional guru dan penilik dan pamong belajar untuk penerbitan penetapan angka kredit (PAK), pembinaan dan penyelenggaraan kompetensi mata pelajaran (olimpiade sains), pelaksanaan akreditasi sekolah (SD/SMP/SMA).
- g) *Program Pendukung Pendidikan Gratis*, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penyediaan dana bantuan SLTA, yaitu pemberian bantuan dana pendidikan bagi siswa SMA/SMK pada 31 sekolah dan penyediaan dana bantuan TK/SD/SMP untuk 102 sekolah.

2. Penyelenggaraan Urusan Kesehatan

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui program penanganan bidang kesehatan yang berorientasi pada aspek pengelolaan manajemen kesehatan serta pelayanan dasar dengan sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Untuk penyelenggaraan urusan ini dialokasikan untuk Dinas Kesehatan dan RSUD A.Makkasau anggaran belanja sebesar Rp.103.305.456.403,- dengan realisasi anggaran Rp.87.997.238.168,- atau 85,18 persen yang dilaksanakan dalam beberapa program yaitu :

- a) *Program Obat dan Perbekalan Kesehatan*, dilaksanakan melalui kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan untuk mendukung ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di seluruh puskesmas wilayah Kota Parepare, serta pelayanan farmasi (DAK).
- b) *Program Upaya Kesehatan Masyarakat*, dilaksanakan dalam beberapa kegiatan antara lain pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya, pemeliharaan dan pemulihan kesehatan, peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan, peningkatan kesehatan olahraga, P3K dan BSB, penatalaksanaan bidang medik, biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan Puskesmas, pengelolaan gedung instalasi farmasi (gudang obat), penyelenggaraan Kota Sehat, pengelolaan jaminan pelayanan kesehatan daerah (Jamkesda), pembinaan Kesehatan Ibu dan Anak/KB, pengawasan sarana kesehatan, obat dan makanan, serta operasional pos kesehatan kelurahan.
- c) *Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat*, dilaksanakan dalam beberapa kegiatan antara lain pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat, pembinaan posyandu, peningkatan pelayanan kesehatan bagi lansia di posyandu, sosialisasi PHBS, sosialisasi bahaya HIV/AIDS dan TBC, penyuluhan bahaya diare dan DBD, serta penyuluhan tentang pola hidup bersih dan sehat.
- d) *Program Perbaikan Gizi Masyarakat*, dilaksanakan dalam beberapa kegiatan antara lain pengadaan/pemberian makanan tambahan bagi bayi, balita dan ibu hamil peningkatan gizi keluarga, institusi dan keluarga, serta sosialisasi makanan bergizi bagi balita.
- e) *Program Pengembangan Lingkungan Sehat*, dilaksanakan melalui kegiatan pendataan sanitasi lingkungan yang bertujuan untuk mengembangkan lingkungan sehat melalui data sanitasi yang ada di masyarakat.
- f) *Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular*, dilaksanakan dalam kegiatan antara lain penyemprotan/*fogging* sarang nyamuk, pengadaan vaksin penyakit menular, peningkatan imunisasi, peningkatan *surveillance* epidemiologi dan penanggulangan wabah, pelayanan kesehatan haji, penatalaksanaan penyakit tidak menular, pencegahan dan pemberantasan penyakit HIV/AIDS, pencegahan dan penanggulangan penyakit infeksi menular seksual (IMS), pencegahan dan penanggulangan penyakit TB Paru, pencegahan dan penanggulangan penyakit TB Kusta, serta penatalaksanaan penyakit endemik dan epidemik.
- g) *Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya*, dilaksanakan dalam beberapa kegiatan antara lain pembangunan puskesmas, pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (DAK), serta pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana posyandu.
- h) *Program Pelayanan BLUD*, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan antara lain belanja bahan obat-obatan, belanja jasa pelayanan, belanja makan dan minuman pasien,

belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum dan belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran bedah.

- i) *Program Pendukung Pelayanan BLUD*, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan antara lain belanja modal pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga, belanja modal pengadaan komputer/notebook, belanja modal pengadaan meja kerja, belanja modal pengadaan tempat tidur, belanja modal pengadaan/pembangunan gedung kantor dan belanja modal tambahan peralatan instalasi gizi.

3. Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan, dengan alokasi anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.13.405.962.800,- dengan realisasi anggaran Rp.12.437.239.675,- atau 92,77 persen yang dilaksanakan dalam program dengan masing-masing kegiatannya, yaitu :

- a) *Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan*, dilaksanakan dalam beberapa kegiatan antara lain peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan kegiatan pengelolaan pengkomposan.
- b) *Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup*, dilaksanakan dalam 2 kegiatan, yaitu pemantauan kualitas lingkungan yang merupakan kegiatan untuk memantau dan menjaga kualitas lingkungan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam penilaian adipura, serta kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup.
- c) *Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam*, dilaksanakan dalam 2 kegiatan, yaitu konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air, serta kegiatan peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air.
- d) *Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup*, dilaksanakan melalui beberapa kegiatan antara lain pengembangan data & informasi lingkungan, kegiatan sosialisasi kebijakan lingkungan hidup, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Parepare Tahun 2012.
- e) *Program Peningkatan Pengendalian Polusi*, dilaksanakan di 3 titik Sungai Karajae (hulu, tengah dan hilir) serta pengujian laboratorium terhadap air limbah yang selama tahun 2012 dilakukan pengujian laboratorium sebanyak ± 128 titik/lokasi.
- f) *Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau*, dilaksanakan untuk memenuhi Ruang Terbuka Hijau 30% kawasan perkotaan, menghijaukan daerah-daerah yang masih gersang, perlindungan terhadap sumber-sumber mata air, mempertahankan daya hidup dari tanaman yang telah ada berupa pembajakan, pemupukan, pemasangan sungkup, pengecatan pohon serta perbaikan taman atau pot-pot yang rusak.
- g) *Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan*, dilaksanakan dalam kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, penyediaan jasa kebersihan kota, serta penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan.
- h) *Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau*, dilaksanakan dalam kegiatan pemeliharaan RTH yang meliputi penyediaan alat-alat penunjang dalam pemeliharaan taman, serta pembayaran perencanaan teknis dan pengawasan teknis pekerjaan penataan RTH.

4. Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum

Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Tata Ruang serta Pengawasan Bangunan dengan alokasi anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.54.065.104.270,- dengan realisasi anggaran Rp.34.487.348.106,- atau 63,79 persen yang dilaksanakan dalam program dengan masing-masing kegiatannya, yaitu :

- a) *Program Pembangunan Jalan dan Jembatan*, dilaksanakan dalam beberapa kegiatan antara lain kegiatan pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan sepanjang 10.828 meter, tambahan jalan dalam kondisi baik 2.755,45 meter, hasil reklamasi pantai 14.750 m² dan tambahan akses jalan seluas 7.200 m², serta perintisan jalan sebagai upaya peningkatan akses jalan mencapai 200 meter.
- b) *Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong*, dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan plat penutup saluran/drainae dengan panjang 755 meter atau 1510 buah plat, pembangunan/rehabilitasi duikker sebanyak 2 unit, pembangunan saluran drainase mencapai 2.233,3 m².
- c) *Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong*, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pembangunan talud kolam habitat air tawar 1 unit atau sepanjang 47 meter, pembangunan tanggul sepanjang 58,3 meter dan pembangunan bronjong sepanjang 200 meter.
- d) *Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan*, dilaksanakan melalui rehabilitasi/pemeliharaan (DAK) jalan sepanjang 8.072.55 meter, dan jalan sepanjang 5.715 m² melalui rehabilitasi/pemeliharaan rutin.
- e) *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan*, dilaksanakan melalui kegiatan pemeliharaan alat-alat berat sebanyak 21 unit.
- f) *Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya*, dilaksanakan dengan pengadaan bak penampungan air 1 unit, rehabilitasi bendungan 4 unit dengan panjang 1.218 meter dan ditambah volume 2.286,38 m² (DAK), pemeliharaan rutin jaringan irigasi 5.237,10 m³.
- g) *Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah*, dilaksanakan melalui Kegiatan pengembangan sistem distribusi air minum meliputi beberapa paket kegiatan yaitu pengadaan sumur bor sepanjang 220 meter, pengadaan mesin 2 unit, penyambungan listrik PLN 2 sambungan, pembangunan rumah jaga 2 unit, pembangunan bak penampungan air 3 unit dan pemasangan pipa sepanjang 1.500 meter, serta pembangunan IPAL 1 unit setiap kecamatan.
- h) *Program Pengembangan Wilayah Strategi dan Cepat Tumbuh*, dilaksanakan untuk penyelesaian administrasi kegiatan penuntasan pembangunan Gedung Olahraga dan kegiatan tambahan/pelengkap bangunan utama Pasar Sentral Lakessi.
- i) *Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan*, dilaksanakan sebagai pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) pada setiap kelurahan (22 kelurahan) yang terdiri atas 3 (tiga) aspek kegiatan yaitu aspek lingkungan, aspek sosial, serta aspek ekonomi.
- j) *Program Perencanaan dan Pendataan*, dilaksanakan melalui prasurvey dan asistensi perencanaan, revisi rutin dokumen RPIJM Keciaptakaryaan, survey dan pembuatan daftar analisa biaya konstruksi SNI, dan perencanaan teknis.
- k) *Program Pembinaan dan Konservasi Arsitektur Bangunan Tradisional dan Bersejarah*, dilaksanakan untuk kelanjutan pembangunan Masjid Agung Parepare.
- l) *Program Pemeliharaan Jalan Umum*, dilaksanakan melalui kegiatan pemeliharaan rutin lampu jalan, penyediaan peralatan komunikasi dan sosialisasi PJU, pengadaan dan pemasangan tiang lampu penerangan jalan umum.

5. Penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang dan Perumahan

Penyelenggaraan urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Pembangunan, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dengan alokasi anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.15.367.515.512,- dengan realisasi anggaran Rp.11.964.414.350,- atau 77,26 persen yang dilaksanakan dalam program dengan masing-masing kegiatannya, yaitu :

- a) *Program Pemanfaatan Ruang*, dilaksanakan melalui kegiatan penataan dan survey rolling tiap lokasi IMB, yaitu pemantauan dan penataan pekerjaan bangunan di Parepare agar tidak menyalahi aturan-aturan tentang Garis Sempadan Bangunan yang berlaku.
- b) *Program Penataan dan Rehabilitasi Lingkungan Pemukiman Kumuh*, dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan jalan lingkungan/lapin, jalan setapak (paving blok, rabat beton), saluran, penutup saluran, dan plat duikker yang dilaksanakan di 22 Kelurahan.
- c) *Program Peningkatan dan Pelayanan Perizinan*, dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan data base IMB yaitu pemutakhiran data jumlah bangunan perumahan dan permukiman Parepare sampai dengan tahun 2012.
- d) *Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang*, dilaksanakan dalam bentuk Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Parepare, yang berfungsi meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang Kota Parepare dengan berdasar pada RTRW Kota Parepare, dan terlaksananya tugas-tugas operasional badan koordinasi penataan ruang daerah (BKPRD) Kota Parepare.
- e) *Program Peningkatan, Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan Permukiman*, dilaksanakan melalui 3 kegiatan, yaitu pemantauan/penertiban bangunan dalam kota, tindak lanjut pendataan bangunan dalam kota parepare, serta sosialisasi IMB dan penataan Ruang.
- f) *Program Peningkatan Perumahan dan Permukiman*, dilaksanakan melalui kegiatan perbaikan dan peningkatan kualitas kawasan perumahan maupun permukiman, melalui pengadaan jaringan air bersih dan pengadaan jaringan listrik.

6. Penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan dan Statistik

Kedua urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan alokasi anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.4.487.318.548,- dengan realisasi anggaran Rp.3.687.574.736,- atau 88,37 persen yang dilaksanakan dalam program dengan masing-masing kegiatannya, yaitu :

- a) *Program Perencanaan Pengembangan Data/Informasi*, dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan profil daerah kota parepare serta pengelolaan *website*.
- b) *Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar*, dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi penyusunan rencana pembangunan kawasan permukiman.
- c) *Program Perencanaan Pembangunan Daerah*, dilaksanakan dalam beberapa kegiatan antara lain kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penyelenggaraan musrenbang, monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, monitoring dan

evaluasi pelaksanaan DAK, DPDF dan tugas pembantuan, serta penyusunan petunjuk teknis pagu indikatif.

- d) *Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi*, dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan indikator ekonomi daerah, koordinasi perencanaan pembangunan, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah, pengembangan ekonomi lokal.
- e) *Program Perencanaan Sosial Budaya*, dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi penyelenggaraan kota sehat, penyusunan indeks pembangunan manusia (IPM) dan pengarusutamaan gender.
- f) *Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam*, dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan manajemen reformasi pengembangan perkotaan dan percepatan pembangunan sanitasi perkotaan.
- g) *Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah*, dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah, serta penyusunan dan pengumpulan data PDRB.

7. Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga, serta Kebudayaan

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata dengan alokasi anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.3.626.628.757,- dengan realisasi anggaran Rp.2.898.723.961,- atau 79,93 persen yang dilaksanakan dalam program dengan masing-masing kegiatannya, yaitu :

- a) *Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan*, dilaksanakan dalam beberapa kegiatan antara lain pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan (Pelatihan Paskibraka), sosialisasi Undang undang Pramuka, serta Kema Bakti Pemuda.
- b) *Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga*, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penyelenggaraan kompetisi olahraga antar pelajar, melaksanakan gerak jalan dan pawai kreasi TK/SD/SMP/SMA/instansi/organisasi/masyarakat, serta penyelenggaraan lomba tradisional seperti lomba terompah, *mallongga*, *ma'raga*, *ma'gasing* dan *lepa-lepa*.
- c) *Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga*, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga melalui pemberian bantuan alat-alat olahraga kepada masyarakat.

8. Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM dengan alokasi anggaran belanja yang sebesar Rp.4.286.613.000,- dengan realisasi anggaran Rp.1.549.058.200,- atau 36,14 persen, yang dilaksanakan dalam program dengan masing-masing kegiatannya, sebagai berikut :

- a) *Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif*, dilaksanakan dalam kegiatan sosialisasi kemitraan dengan perbankan.
- b) *Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah*, dilaksanakan dalam kegiatan memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah berupa pengadaan gerobak jualan 83 buah dan alat cuci mobil/motor 3 unit, pelatihan dan pemberian alat sablon dan pembinaan pengolahan air nira.
- c) *Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM* dilaksanakan dalam kegiatan koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk usaha kecil menengah dan koperasi, penyelenggaraan promosi produk UMKM, penyelenggaraan pameran produk Indonesia (PPI), penagihan dan penyelesaian dana bergulir, pemberian

modal usaha bagi perorangan tanpa bunga, pemberian 30 buah peralatan warung campuran, pelatihan pembuatan kue dan pemberian peralatan, pelatihan pengolahan jambu mente dan pemberian peralatan usaha, pelatihan dan pemberian peralatan usaha salon, pelatihan dan pemberian peralatan usaha laundry, pelatihan dan pemberian peralatan usaha accessories dan kerajinan tangan, pelatihan dan pemberian peralatan usaha perak, pelatihan dan pemberian peralatan usaha menjahit, pelatihan dan pemberian peralatan usaha kue tradisional, pelatihan dan pemberian peralatan usaha service kompor gas, pelatihan manajemen usaha dan pemberian peralatan usaha makanan siap saji.

- d) *Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi*, dilaksanakan dalam kegiatan penilaian kesehatan koperasi, serta pelatihan penyusunan laporan keuangan koperasi.

9. Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Penyelenggaraan urusan kependudukan dan pencatatan sipil ini dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan dukungan alokasi anggaran belanja sebesar Rp.2.621.674.645,- dengan realisasi anggaran Rp.2.235.358.963,- atau 85,26 persen yang dilaksanakan dalam *Program Penataan Administrasi Kependudukan* melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan yang selama Tahun 2012, telah dilayani/diterbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 10.805 buah, Kartu Keluarga (KK) 19.796 buah, Akta Kelahiran 4.171 buah, Akta Perkawinan 60 buah. Kegiatan pelaksanaan perekaman E-KTP sampai Desember 2012 mencapai 80.144 orang atau 70,32% dari target 113.970 orang, sosialisasi penerapan E-KTP, pengoperasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpadu, pelaksanaan verifikasi dan konversi data kependudukan.

10. Penyelenggaraan Urusan Ketenagakerjaan

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dengan alokasi anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.6.863.107.787,- dengan realisasi anggaran Rp.5.078.689.830,- atau 74,00 persen yang dilaksanakan dalam program dengan masing-masing kegiatannya, sebagai berikut :

- a) *Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja*, dilaksanakan melalui kegiatan akreditasi lembaga pelatihan kerja swasta yang dilaksanakan oleh Balai Kompetensi Tenaga Kerja (BKTK) Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare, pembinaan lembaga pelatihan kerja pemerintah/swasta dan perusahaan, peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas dan pelatihan komputer BLK.
- b) *Program Peningkatan Kesempatan Kerja*, dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, antara lain penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja, pembentukan dan pendayagunaan TKPMP Pendamping UKM, bimbingan teknik bursa kerja swasta, serta penanganan TKI bermasalah.
- c) *Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja*, dilaksanakan dalam bentuk pembinaan dan pengawasan, kunjungan ke perusahaan, sosialisasi rapat pertemuan, pemeriksaan dan penanganan kasus perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha melalui kegiatan pemeriksaan dan pengujian objek K3, pemberdayaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Daerah, pengumpulan dan pengolahan data kebutuhan hidup layak (KHL), penyelesaian kasus ketenagakerjaan, sosialisasi upah minimum provinsi bagi pekerja dan pengusaha,

sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang hubungan industrial, pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja, serta pembinaan dan pengawasan norma kerja di perusahaan.

11. Penyelenggaraan Urusan Ketahanan Pangan

Urusan Ketahanan Pangan ini dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp.2.663.314.001,- dengan realisasi anggaran Rp.2.185.985.966,- atau 82,08 persen, yang dilaksanakan melalui kegiatan ketahanan pangan yang terselenggara dengan baik kepada masyarakat pangan, petani dan kelompok-kelompok tani binaan Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan. Terselenggaranya kegiatan ketahanan pangan dengan baik dengan memaksimalkan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya sarana penunjang dan pelayanan administrasi perkantoran yang sudah tersedia sejak tahun anggaran 2008. Dengan lancarnya kegiatan administrasi perkantoran, maka telah tersusun laporan capaian kinerja dan realisasi, laporan keuangan, dan anggaran SKPD.

12. Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial

Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dengan alokasi anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.4.449.445.193,- dengan realisasi anggaran Rp.3.341.132.527,- atau 52,84 persen yang dilaksanakan dalam program dengan masing-masing kegiatannya, sebagai berikut :

- a) *Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak*, dilaksanakan dalam beberapa kegiatan, yaitu fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A), pengembangan Jejaring Forum Anak, sosialisasi pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak.
- b) *Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan*, dilaksanakan dalam kegiatan fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan, serta sosialisasi tentang KDRT, trafficking dan eksploitasi anak.
- c) *Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan*, dilaksanakan dalam kegiatan pembinaan organisasi perempuan dengan melaksanakan peringatan Hari Ibu dan pengembangan kepribadian.
- d) *Program Keluarga Berencana*, setiap tahunnya dilaksanakan secara rutin dalam rangka meningkatkan pencapaian peserta KB dari semua kontrasepsi yang ada khususnya pada masyarakat yang kurang mampu untuk ber-KB secara gratis, pelayanan KIE (komunikasi informasi dan edukasi), pembinaan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria dalam KB dan kesehatan reproduksi, serta pemasangan papan himbauan keluarga berencana.
- e) *Program Kesehatan Reproduksi Remaja*, dilaksanakan melalui kegiatan pelayanan informasi dan konseling tentang kesehatan reproduksi remaja serta kegiatan penunjang lainnya.
- f) *Program Pelayanan Kontrasepsi*, dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kontrasepsi KB dan pengadaan alat kontrasepsi dengan capaian peserta KB MOW sebanyak 122 orang, KB MOP 1 orang, peserta KB IUD sebanyak 189 orang dan peserta KB INPLANT sebanyak 339 orang. Pemasangan kontrasepsi dilaksanakan di Rumah Sakit Sumantri, Fatimah, RSUD A.Makkasau maupun di Puskesmas yang ada di kota Parepare.

- g) *Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri*, dilaksanakan melalui pengelolaan data dengan informasi program KB. Kegiatan ini untuk pengolahan data dan informasi termasuk kegiatan pendataan dan pengadaan baliho untuk data KB di tingkat kecamatan dan kelurahan yang pelaksanaan kegiatannya melalui penyuluh KB, PPKBD dan Sub PPKBD baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kelurahan.
- h) *Program Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu PADU*, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penilaian lomba kelompok masyarakat berprestasi dengan melibatkan para kader institusi di kelurahan (PPKBD,SUB PPKBD) dan kelompok masyarakat lainnya.

13. Penyelenggaraan Urusan Perhubungan

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.4.256.176.895,- dengan realisasi anggaran Rp.4.205.952.570,- atau 98,82 persen yang dilaksanakan dalam program dengan masing-masing kegiatannya, sebagai berikut :

- a) *Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan*, yang dilaksanakan dalam beberapa kegiatan antara lain penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur Bidang Perhubungan, koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan, peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat, serta peningkatan pengelolaan perparkiran.
- b) *Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ*, dilaksanakan dalam beberapa kegiatan antara lain rehabilitasi dan pemeliharaan terminal/pelabuhan, serta rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas.
- c) *Program Peningkatan Pelayanan Angkutan*, dilaksanakan dalam beberapa kegiatan, antara lain kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang, pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya dan sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan.
- d) *Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas*, dilaksanakan melalui kegiatan pengadaan rambu-rambu lalu lintas, serta peningkatan keselamatan transportasi darat.

14. Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi dengan alokasi anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.1.970.679.903,- dengan realisasi anggaran Rp.1.875.033.882,- atau 95,15 persen yang dilaksanakan dalam program dengan masing-masing kegiatannya, sebagai berikut :

- a) *Program Pengembangan Komunikasi Informasi & Media Massa*, dilaksanakan dalam bentuk Penerbitan Buletin didalamnya memuat berita seputar kegiatan Pemerintah Kota Parepare dan berita lain tentang media informasi yang berbasis teknologi dan informasi (IT).
- b) *Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa*, dilaksanakan melalui kegiatan pembuatan rancangan perda tentang Radio Suara Bandar Madani, penyebaran informasi mobil unit suara (mobil *rolling*), operasional pelayanan sound system, operasional pelayanan Media Centre, operasional mobil pusat layanan internet kecamatan (M-PLIK), serta operasionalisasi Website Pemerintah Kota Parepare.

15. Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Satuan Polisi Pamong Praja dengan alokasi anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.5.212.608.804,- dengan realisasi anggaran Rp.4.741.484.053,- atau 90,96 persen yang dilaksanakan dalam program dengan masing-masing kegiatannya, sebagai berikut :

- a) *Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal*, dilaksanakan melalui 2 kegiatan, yaitu peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan SISKAMSWAKARSA di daerah yang diwujudkan dalam bentuk Komunitas Intelegen Daerah (KOMINDA), serta kegiatan posko terpadu.
- b) *Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan*, dilaksanakan dalam beberapa kegiatan, antara lain Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB) Pemerintah Kota, Pelatihan/pendidikan bela negara, *Workshop* Pembauran Bangsa, Sosialisasi Peraturan Bersama Menag dan Mendagri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, serta pelatihan korsik anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
- c) *Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)*, dilaksanakan melalui 3 kegiatan, yaitu penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba, penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi, serta penyuluhan pencegahan eksploitasi anak bawah umur.
- d) *Program Pendidikan Politik Masyarakat*, dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yaitu monitoring, evaluasi dan pelaporan, fasilitasi bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), forum komunikasi dan pertemuan berkala ormas, LSM dan Pemerintah Daerah, penyuluhan kepada Masyarakat tentang Etika Budaya Politik, pendidikan politik pemuda perspektif gender, serta Rakorda Pengamanan Pilkada Gubernur & Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Parepare.

16. Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Penyelenggaraan urusan ini diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan, antara lain :

a. Program Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Pembinaan Perangkat Daerah serta persandian.

Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang melaksanakan program dan kegiatan ini adalah Sekretariat Daerah Kota yang terdiri dari 10 (sepuluh) bagian yaitu : Pemerintahan, Humas, Hukum & Perundang-undangan, Kesejahteraan Rakyat, Ekonomi, Pembangunan, Keuangan, Umum, Asset dan Organisasi dengan alokasi Rp.41.204.230.296,- dengan realisasi Rp.36.247.827.615,14,- atau 86,44 persen. Beberapa program yang dilaksanakan, antara lain :

- 1) *Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah*, dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi konflik pertanahan.
- 2) *Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah*, dilaksanakan dalam beberapa kegiatan, antara lain penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Penyusunan Laporan Evaluasi Pengukuran Kinerja Mandiri (EPKM-PP Nomor 6 Tahun 2008), Bimbingan Teknis Penyusunan LPPD, penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemda, serta tindaklanjut hasil temuan pengawasan.

- 3) *Program Penataan Peraturan Perundang-undangan*, dilaksanakan dalam beberapa kegiatan, antara lain koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan, legislasi rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan, publikasi peraturan perundang-undangan, serta sosialisasi RANHAM.
- 4) *Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa*, dilaksanakan dalam beberapa kegiatan, antara lain penyebarluasan informasi pembangunan daerah, visualisasi kegiatan Pemerintah Kota Parepare, pengelolaan website Humas Setdako Parepare (www.setdako.pareparekota.go.id), penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (*SMS Centre*).
- 5) *Program Kesejahteraan Rakyat*, dilaksanakan dalam beberapa kegiatan, antara lain mengikuti MTQ Tingkat Propinsi, Festival Anak Saleh Indonesia Tingkat Kota, pembinaan dan pengawasan NAPZA, dzikir dan taushiyah Muharram, pengembangan minat masyarakat bidang keagamaan, pembinaan dan peningkatan mental keagamaan, serta Festival Maulid Nusantara.

b. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah

Program ini dialokasikan Rp.12.412.890.014,- dengan realisasi Rp.10.186.845.808,- atau 82,07 persen dan dilaksanakan Dinas Pendapatan Daerah. Sasaran program ini adalah meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan daerah lainnya.

Persentase penerimaan PAD Kota Parepare pada Tahun 2012 mencapai Rp.51.180.986.443,16,- atau 75,54 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp.67.756.792.623,38,-. Sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari :

1) Pajak Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2012 ditargetkan sebesar Rp.10.805.950.000,- dan sampai akhir tahun anggaran dapat direalisasikan sebesar Rp.12.161.925.837,- atau sebesar 112,55%. Dengan demikian telah melampaui target penerimaan sebesar Rp 1.355.975.837,-

2) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 telah ditargetkan sebesar Rp.8.420.960.000,- sampai akhir tahun anggaran 2012 hanya direalisasikan sebesar Rp.8.045.711.591,- atau sebesar 95,54 %.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pada Pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Perusahaan Milik Daerah/BPD Sul-Sel, Deviden), pada APBD Tahun Anggaran 2012 telah ditargetkan sebesar Rp.2.737.677.623,38,-. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 dapat direalisasikan sebesar Rp.2.737.677.623,38,- atau dengan persentase capaian sebesar 100%.

4) Lain-lain PAD yang sah

Terkait dengan pengelolaan pos pendapatan ini dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 telah ditetapkan sebesar Rp.45.792.205.000,- hanya direalisasikan sebesar Rp.28.235.671.391,78 atau 61,66%.

Untuk persentase peningkatan penerimaan daerah lainnya, bagian Dana Perimbangan pada APBD tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp.415.255.659.195,-

dengan realisasi sebesar Rp.411.328.493.236,- yang meliputi : 1) Dana bagi hasil pajak, 2) Dana bagi hasil bukan pajak, 3) Dana Alokasi Umum, 4) Dana Alokasi Khusus, serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp.119.067.217.556,17 dengan realisasi sebesar Rp.70.303.439.266,48,- dengan persentase sebesar 59,05%.

c. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja

Program ini dialokasikan dengan anggaran Rp.2.791.358.181,- dengan realisasi Rp.2.744.776.471,- atau 98,33 persen dan dilaksanakan Inspektorat Kota Parepare. Sasaran program ini adalah meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator realisasi pelaksanaan program dan kegiatan antara lain :

- 1) *Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH*, dilaksanakan dalam beberapa kegiatan, yaitu pelaksanaan pengawasan internal secara berkala, melalui pemeriksaan komprehensif PKPT, pemeriksaan mutasi jabatan, pemeriksaan evaluasi kegiatan, evaluasi berkala temuan hasil pengawasan, evaluasi dana bos dan dana alokasi khusus.
- 2) *Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan*, dilaksanakan melalui pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja.
- 3) *Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan*, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Sinergitas Pelaksanaan Pengawasan dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
- 4) *Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat*, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat yaitu pemeriksaan pengaduan masyarakat sebanyak 11 kasus dengan 11 LHP, pemeriksaan PP 10 Tahun 1983 sebanyak 20 kasus dengan 20 LHP serta pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin PNS sebanyak 4 kasus dengan 4 LHP.

d. Program Peningkatan Kinerja Legislatif

Program ini dialokasikan sebesar Rp.17.605.991.876,- dengan realisasi Rp.16.531.934.131,- atau 95,26 persen dan dilaksanakan Sekretariat DPRD. Sasaran program ini adalah meningkatnya akuntabilitas dan kinerja legislatif. Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan dengan indikator pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1) *Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah*, dilaksanakan dalam beberapa kegiatan, antara lain pembahasan rancangan peraturan daerah sebanyak 38 ranperda, hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah, dan tokoh masyarakat/tokoh agama sebanyak 74 kali pertemuan, rapat-rapat alat kelengkapan dewan, dilaksanakan dalam bentuk: *i)* rapim dewan terlaksana sebanyak 22 kali; *ii)* rapat badan musyawarah terlaksana sebanyak 22 kali; *iii)* rapat komisi terlaksana sebanyak 39 kali; *iv)* rapat badan anggaran terlaksana sebanyak 20 kali, rapat-rapat paripurna, dilaksanakan dalam bentuk: *i)* rapat paripurna sebanyak 72 kali, dari rapat tersebut menghasilkan Keputusan DPRD Kota Parepare sebanyak 26 keputusan, dan keputusan pimpinan DPRD Kota Parepare sebanyak 3 keputusan, kegiatan reses sebanyak 3 kali dalam setahun, kunjungan kerja

pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah, peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dilakukan di dalam propinsi 5 kali, luar propinsi sebanyak 3 kali oleh tiap pimpinan dan anggota DPRD, sosialisasi peraturan perundang-undangan, penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan, publikasi peraturan perundang-undangan, kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah, koordinasi dan evaluasi ranperda.

- 2) *Program Kerja Sama Informasi dengan Media Massa*, dilaksanakan melalui kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (publikasi kehumasan).

e. Program Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur

Alokasi anggaran dalam rangka program pendayagunaan sumber daya aparatur sebesar Rp.4.733.843.190,- dengan realisasi Rp.4.569.832.360,- atau 96,54 persen yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah. Sasaran program ini adalah meningkatnya kualitas SDM aparatur. Capaian program ini diukur dengan program dan kegiatan, antara lain :

- 1) *Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur*, dilaksanakan dalam beberapa kegiatan antara lain penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS, proses penanganan kasus-kasus disiplin PNSD, pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas, Tim peneliti penganugerahan tanda kehormatan satyaencana karya satya, penyelenggaraan rapat BAPERJAKAT, pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah, penetapan NIP CPNSD, penyelesaian tenaga honorer, analisis kebutuhan pegawai, administrasi status kepegawaian, serta Sistem Aplikasi Pengelolaan Kepegawaian.
- 2) *Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur*, dilaksanakan melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS, Pendidikan dan Pelatihan Tekhnis Tugas dan Fungsi bagi PNSD, serta Pendidikan dan Pelatihan Penilaian Angka Kredit dan Tenaga Fungsional.

f. Program Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan

Alokasi anggaran yang diarahkan pada peningkatan kinerja aparatur kecamatan sebesar Rp.18.352.228.001,- dengan realisasi Rp.17.143.633.977,- atau 94,34 persen. Sasaran program ini adalah meningkatnya akuntabilitas dan kinerja aparatur kecamatan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, diukur dengan menggunakan indikator pelaksanaan program dan kegiatan berupa:

- 1) *Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat*, dilaksanakan dengan melibatkan unsur-unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, aparat babinkamtibmas dan babinsa, serta pelibatan unsur muspika dalam penanganan pengaduan yang sifatnya diteruskan penyelesaiannya pada tingkatan yang lebih tinggi. Kegiatan ini memberikan kontribusi positif terhadap penyelesaian kasus-kasus yang terbukti mampu diselesaikan dengan cepat dan tepat serta memberikan solusi bagi kedua belah pihak dan diupayakan tidak ada yang merasa dirugikan.
- 2) *Pembinaan Imtak dan organisasi kemasyarakatan*, dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan seleksi Musabaqah Tilawatil Qur'an pada tingkat kecamatan untuk dipersiapkan mewakili kecamatan dalam kegiatan yang sama pada

tingkat kota. Pembinaan organisasi kemasyarakatan dimaksudkan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kecamatan dan kelurahan dalam mensosialisasikan rencana dan program pembangunan pemerintah kepada masyarakat. Para ketua RW dan RT ditunjuk untuk mengkoordinir seluruh warga melakukan pendataan penduduk, sehingga diperoleh data mengenai keadaan penduduk dalam suatu wilayah untuk selanjutnya dijadikan tolak ukur dalam perencanaan pembangunan masyarakat.

- 3) *Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur*, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pendidikan dan pelatihan formal. Kegiatan ini dikhususkan untuk semua aparat pelayanan yang terdapat di kecamatan dan kelurahan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian aparat tersebut. Beberapa pegawai diikutkan dalam pendidikan dan latihan ataupun bimbingan teknis baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun dengan bekerjasama dengan organisasi lain.

g. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan

Alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi program ini adalah Rp.1.416.528.995,- dengan realisasi Rp.1.118.815.611,- atau 78,98 persen yang dilaksanakan Kantor Pelayanan Perizinan. Sasaran program ini adalah meningkatnya akuntabilitas dan kinerja aparatur pengelola pelayanan perizinan. Pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain :

- 1) *Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi*, yang dilaksanakan melalui kegiatan penyempurnaan sistem informasi terhadap layanan publik yang berstandar sistem manajemen mutu berstandar internasional ISO versi 9001:2008.
- 2) *Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Satu Atap*, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun kebijakan pelayanan publik di bidang perizinan dan non perizinan dengan capaian kinerja terselenggaranya pelayanan publik dibidang perizinan dan non perizinan yang berkualitas prima dengan memenuhi klausul-klausul dalam sistem manajemen mutu berstandar internasional ISO Versi 9001:2008, yang dibukukan ke dalam pedoman mutu dan prosedur mutu atau SOP (Standar Operasional Prosedur) dan SPM (Standar Pelayanan Minimal).

h. Program Peningkatan Pelayanan Sekretariat Korpri

Dalam mendukung pelaksanaan fungsi sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kota Parepare dialokasikan anggaran sebesar Rp.610.406.727,- dengan realisasi Rp.497.751.926,- atau 81,54 persen dengan capain program sebagai berikut :

- 1) *Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur*, dengan kegiatan yaitu pendidikan dan pelatihan formal dan Porseni KORPRI dengan keterlibatan pada Pekan Olahraga Propinsi (PORPROV) Tingkat Propinsi Sulawesi Selatan maupun Porseni Tingkat Kota Parepare di Parepare.
- 2) *Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan*, dengan kegiatan pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan baik dalam bentuk konsultasi dibidang hukum maupun dalam bentuk menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum baik

di luar maupun di dalam pengadilan untuk kepentingan anggota di kepolisian dan Kejaksaan.

- 3) *Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS*, dengan kegiatan Prosesi pemakaman jenazah anggota KORPRI/PNS lingkup Pemerintah Kota Parepare yang selama Tahun Anggaran 2012 telah dilakukan prosesi pemakaman jenazah 15 (lima belas) kali terhadap anggota KORPRI yang meninggal dunia.

17. Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

Alokasi anggaran belanja yang ditetapkan untuk penyelenggaraan urusan ini adalah sebesar Rp.3.951.234.335,- dengan realisasi belanja sebesar Rp.3.077.795.872,- atau 77,89 persen dan dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui beberapa program, yaitu :

- a) *Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan*, dilaksanakan dalam beberapa kegiatan antara lain pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan, insentif Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) sebanyak 220 orang yang tersebar di 22 kelurahan se Kota Parepare, perbaikan rumah keluarga miskin perbaikan rumah meliputi; atap, lantai dan dinding kepada 130 keluarga miskin, pemberian seragam sekolah dan perlengkapannya bagi warga miskin berupa pemberian bantuan pakaian seragam sekolah lengkap, buku tulis dan tas kepada 410 murid SD keluarga miskin, penyediaan Jamban Keluarga Miskin berupa pemberian bantuan pembangunan jamban kepada 74 keluarga miskin, serta fasilitasi pemberdayaan kelembagaan masyarakat.
- b) *Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa*, dilaksanakan dalam kegiatan pelaksanaan musyawarah pembangunan kelurahan berupa pra musyawarah perencanaan pembangunan (pra musrenbang), serta peningkatan kapasitas *stakeholder* kelurahan melalui Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Perencanaan Strategi Kelurahan (Renstra) bagi *stakeholder* kelurahan yang melibatkan 160 peserta.

18. Penyelenggaraan Urusan Sosial

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan anggaran belanja yang dialokasikan sebesar Rp.3.230.045.563,- dengan realisasi Rp.2.603.974.368,- atau 80,62 persen dan dilaksanakan dalam program antara lain :

- a) *Program Pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya*, dilaksanakan dalam beberapa kegiatan antara lain peningkatan kemampuan (*capacity building*) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS Lainnya, pengadaan sarana prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin berupa pemberian stimulan pendukung usaha kepada fakir miskin sebanyak 120 orang Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan 6 Kelompok Usaha Bersama (KUBE), serta pemberdayaan sosial bagi wanita rawan sosial ekonomi berupa stimulan usaha penjahit kepada 1 kelompok usaha bersama.
- b) *Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial*, dilaksanakan beberapa kegiatan, antara lain : pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak melalui pelatihan dan bimbingan sebanyak 25 orang berupa usaha barang campuran, penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa berupa pemberian bantuan dan pertolongan kepada korban bencana alam dan korban

kebakaran, pelayanan orang terlantar berupa pemulangan kepada orang yang terlantar di Kota Parepare ke daerah asal, pembinaan Tagana dengan mengadakan pelatihan pembinaan kepada anggota Tagana sebanyak 65 orang.

- c) *Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo* melalui kegiatan peningkatan SDM dan pembinaan pengurus panti melalui kegiatan pelatihan sebanyak 30 orang.
- d) *Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial*, dilaksanakan melalui kegiatan pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Karang Taruna sebanyak 13 Karang Taruna.

19. Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

Alokasi anggaran urusan perpustakaan dan kearsipan yang ditetapkan untuk penyelenggaraan urusan ini adalah Rp.1.450.411.690,- dengan realisasi Rp.1.401.747.511,- atau 97,14 dan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, dengan capaian program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

- a) *Program Peningkatan Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan*, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pengadaan buku perpustakaan sebanyak 324 judul/1.158 eksemplar sehingga bahan bacaan menjadi 7.789 judul/22.494 eksemplar, supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat yang dilakukan terhadap 16 perpustakaan dan supervisi dalam pengelolaan perpustakaan tingkat sekolah, operasional mobil perpustakaan keliling, serta pengolahan bahan pustaka.
- b) *Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan*, dilaksanakan dalam kegiatan pengumpulan data, pengklasifikasian data, serta penyusunan sistem katalog data.
- c) *Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Dan Penyimpanan Kearsipan*, dilaksanakan dalam kegiatan pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan penyimpanan kearsipan, monitoring, serta evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data.

PENYELENGGARAAN URUSAN PILIHAN

20. Penyelenggaraan Urusan Pertanian/Peternakan, Kehutanan, serta Kelautan dan Perikanan

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui program pembinaan dan pengembangan pertanian (tanaman pangan), peternakan, kehutanan, serta kelautan dan perikanan. Alokasi anggaran belanja yang ditetapkan untuk penyelenggaraan urusan ini adalah sebesar Rp.13.007.665.344,- dengan realisasi belanja Rp.6.669.338.035,- atau 31,30 persen dan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan (PKPK), serta Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan. Sasaran yang ingin dicapai melalui program tersebut adalah meningkatnya hasil pertanian dan kesejahteraan petani, hasil peternakan, kehutanan serta kelautan dan perikanan. Untuk menilai pencapaian sasaran tersebut, digunakan indikator pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- a) *Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan*, dengan kegiatan pengembangan pembenihan/pembibitan sebanyak 7 jenis, peningkatan kapasitas statistik pertanian, dan pengembangan penyediaan sarana dan prasarana pertanian.
- b) *Program peningkatan produksi pertanian*, dengan kegiatan penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan berupa penyediaan embung sebanyak 3 unit.

- c) *Program Peningkatan Kesejahteraan Petani*, dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, antara lain penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis berupa pengembangan pengelolaan sayuran organik bagi petani sayuran di Kelurahan Bukit Indah serta peningkatan kemampuan lembaga petani.
- d) *Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)*, dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan mutu dan keamanan pangan dengan melakukan survey terhadap masyarakat di 22 kelurahan di Kota Parepare, penyusunan Analisis ketersediaan Pangan dan Neraca Bahan Makanan (NBM) berupa survei data primer tentang produksi pangan petani, produk pangan yang masuk ataupun yang keluar wilayah, produk pangan yang digunakan maupun produk pangan yang memerlukan pengolahan lebih lanjut, analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), analisis dan penyusunan pola konsumsi pangan harapan, serta penyusunan statistik ketahanan pangan.
- e) *Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan*, dilaksanakan melalui kegiatan gerakan diversifikasi konsumsi pangan, serta distribusi pangan dan pemantauan harga pasar berupa pengumpulan informasi harga pangan, pasokan dan akses pangan yang dipantau secara rutin atau periodik untuk bahan analisis masalah distribusi pangan.
- f) *Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan*, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan serta peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan.
- g) *Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak*, dengan kegiatan pendataan masalah peternakan, pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak, pengawasan perdagangan ternak antar daerah, dan pemberantasan anjing liar yang dilaksanakan sebanyak 3 kali.
- h) *Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan*, dengan kegiatan pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat dan pengendalian pemotongan betina produktif berupa pengadaan sapi dan kambing kepada masyarakat serta penyediaan vitamin dan obat-obatan.
- i) *Program Pemanfaatan Sumber Daya Hutan*, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pemeliharaan kawasan hutan JompiE dengan penambahan batas-batas fisik, serta pemeliharaan kawasan hutan Alitta I dan II.
- j) *Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan*, dilaksanakan melalui rehabilitasi hutan seluas 70 ha. dan pembangunan sarana dan prasarana sebanyak 7 unit.
- k) *Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan*, dilaksanakan melalui pengamanan kawasan hutan dan penertiban peredaran hasil hutan dengan patroli rutin terhadap pengamanan kawasan hutan dan operasi gabungan.
- l) *Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pesisir*, dilaksanakan melalui penelitian masyarakat pesisir sehingga tersedia *data base* tentang peta kemiskinan nelayan dan gambaran kemiskinannya.
- m) *Program pengembangan perikanan tangkap*, dilaksanakan dengan pembangunan fasilitas PPI CempaE berupa kendaraan dinas operasional, penyediaan pabrik pengolahan es, rehabilitasi PPI dengan jumlah keseluruhan 103 unit, serta operasionalisasi kolam air tawar 5 unit.
- n) *Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan*, dilaksanakan dalam bentuk pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan dengan

tersedianya jasa tenaga kerja pengawasan PPI CempaE baik di darat maupun di laut sebanyak 23 orang.

21. Penyelenggaraan Urusan Pariwisata

Urusan pariwisata ini diselenggarakan Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar Rp.553.124.900,- dengan realisasi Rp.384.575.001,- atau 69,53 persen. Realisasi program dan kegiatan diuraikan sebagai berikut :

- a) *Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata*, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pengembangan jaringan kerja sarana promosi pariwisata yang diwujudkan dengan pelaksanaan pemilihan duta Pariwisata kota Parepare, serta pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan diluar negeri, yang diwujudkan dengan keikutsertaan Kota Parepare pada kegiatan Kemilau Sulawesi dan Lovely Desember.
- b) *Program Pengembangan Destinasi Pariwisata*, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pengembangan obyek pariwisata unggulan yang diwujudkan dengan melaksanakan Festival Salo Karajae, serta mengadakan penataan dan pengecatan kubur Datuk Lacincing yang merupakan Cagar Budaya.
- c) *Program Pengembangan Kemitraan*, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata.

22. Penyelenggaraan Urusan Perindustrian dan Perdagangan

Urusan ini diselenggarakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dengan alokasi belanja sebesar Rp.6.175.395.244,- dengan realisasi sebesar Rp.3.823.337.708,- atau 55,52 persen yang direalisasikan melalui program pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan. Untuk menilai pencapaian sasaran tersebut, digunakan indikator pelaksanaan kegiatan, sebagai berikut :

- a) *Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan*, dilaksanakan dalam kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen yang diselesaikan pada tahun 2012 sebanyak 6 kasus dan dapat dimediasi sebelum masuk keranah hukum, peningkatan pengawasan barang dan jasa yang dilaksanakan selama 12 bulan secara rutin, mengecek peredaran barang dan jasa utamanya dipasar, pusat perbelanjaan/pertokoan dan warung campuran, serta operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolagian daerah.
- b) *Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri*, dilaksanakan dalam kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang/produk yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat pada hari raya, penataan kios/lods Pasar Semi Modern Lakessi, pelaksanaan operasi pasar sembako, temu usaha perdagangan, pengecer, sub distributor dan distributor.
- c) *Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi*, dilaksanakan berupa bantuan peralatan pertukangan kayu.
- d) *Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah*, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pemberian peralatan pertukangan batu kepada 25 orang tukang batu, pemberian bantuan peralatan pembuatan aquarium ikan sebanyak 50 orang.
- e) *Program Peningkatan Kemampuan Teknologi*, dilaksanakan dalam kegiatan pemberian bantuan peralatan usaha abon kepada 50 orang serta bimbingan teknis penerapan HAKI.
- f) *Program Penataan Struktur Industri* dilaksanakan dalam kegiatan pemberian peralatan perbengkelan kepada 37 orang berupa kompressor dan perlengkapan lainnya.

- g) *Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial*, dilaksanakan dalam kegiatan monitoring SITU dan TDI, penyelenggaraan pameran pembangunan serta penyelenggaraan pameran Dekranas.

D. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Selain menyelenggarakan urusan desentralisasi, Pemerintah Kota Parepare juga menyelenggarakan tugas pembantuan yang berasal dari dari Pemerintah Pusat. Pada Tahun 2012 Pemerintah Kota Parepare mendapatkan bantuan pendanaan melalui 3 (tiga) SKPD untuk menjalankan tugas pembantuan tersebut, yaitu :

1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Tugas pembantuan yang diterima dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, dilaksanakan dalam Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri melalui kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (Pembangunan Pasar Kuliner dan Pasar UKM-PKL). Alokasi anggarannya sebesar Rp.12.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.11.912.535.400,- dan dilaksanakan dengan sasaran untuk meningkatkan efektifitas kebijakan yang menunjang pengembangan dan pengamanan perdagangan dalam negeri. Dengan pembangunan Pasar Kuliner dan Pasar UKM-PKL ini dapat meningkatkan volume aktifitas perdagangan Kota Parepare, selain itu menciptakan pula sarana perdagangan yang bersih, aman dan nyaman.

2) Dinas Tenaga Kerja

Tugas pembantuan yang diterima dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dilaksanakan melalui Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, yang kegiatannya Padat Karya Infrastruktur 1 paket dan Padat Karya Produktif 3 paket. Padat Karya Infrastruktur 1, pelaksanaannya berupa pembuatan jalan tanah sepanjang 1.000 meter di Kelurahan Lompoe. Padat Karya Produktif 1, pembuatan kolam ikan air tawar sebanyak 2 unit di Kelurahan Watang Bacukiki. Padat Karya Produktif 2, yaitu pembuatan kandang sapi sebanyak 1 unit di Kelurahan Lompoe dan Padat Karya Produktif 3 yaitu pembuatan tempat pembakaran batu bata 1 unit di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang. Total alokasi anggaran sebesar Rp.666.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp.643.083.800,- .

3) RSUD Andi Makkasau

Tugas pembantuan yang diterima dari Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan, dilaksanakan melalui Program Pembinaan Upaya Kesehatan dalam bentuk kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pengadaan alat-alat kedokteran, kesehatan dan keluarga berencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.000.000.000,- dengan realisasi Rp.9.986.228.000,-.

4) Dinas Kesehatan

Tugas pembantuan yang diterima dari Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementrian Kesehatan melalui Program Bina Gizi Dan Kesehatan Ibu dan Anak, yang dilaksanakan melalui kegiatan bantuan operasional kesehatan untuk puskesmas, monitoring dan evaluasi bantuan operasional kesehatan, dan sosialisasi program bantuan operasional kesehatan ke puskesmas. Bantuan operasional kesehatan diberikan kepada enam puskesmas yang dilaksanakan dalam bentuk : pendataan sasaran (ibu hamil, ibu nifas, ibu bersalin, bayi, balita, kasus risiko tinggi, RT, siswa, sekolah, pasangan usia subur, Wanita usia subur, TU), *surveilans* (Gizi, KIA, Imunisasi, Penyakit Menular dan Tidak Menular), kunjungan lapangan (pemasangan stiker P4K,

ANC, PNC,dll), pelayanan di posyandu, serta PMT Penyuluhan. Honorarium pengelolaan bantuan operasional kesehatan yang diberikan kepada pengelola satuan kerja dan pengelola bantuan operasional kesehatan di enam puskesmas. Monitoring dan evaluasi bantuan operasional kesehatan yang dilaksanakan dalam bentuk pertemuan evaluasi triwulanan kegiatan bantuan operasional kesehatan yang diberikan dalam bentuk biaya transport untuk petugas monitoring dan peserta pertemuan serta konsumsi untuk pelaksanaan monitoring serta pemberian honor bagi narasumber. Sedangkan sosialisasi program bantuan kesehatan ke Puskesmas tentang pendataan sasaran (ibu hamil, ibu nifas, ibu bersalin, bayi, balita, kasus risiko tinggi, RT, siswa, sekolah, pasangan usia subur, Wanita usia subur TU) dan surveilans (Gizi, KIA, Imunisasi, Penyakit Menular dan Tidak Menular). Pelaksanaan program ini dianggarkan Rp.726.000.000,- dengan realisasi Rp.717.542.940,-.

5) Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan

Tugas pembantuan yang diterima dari Direktorat Jendral Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap, dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan pengawakan kapal perikanan berupa pembangunan kapal perikanan >30 GT. Sasaran yang hendak dicapai adalah tersedianya jumlah kapal penangkap ikan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap, dan laik simpan sehingga mampu meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan. Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.3.000.000.000,- dengan realisasi Rp.2.214.426.500,-.

E. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan diantaranya meliputi kerjasama daerah dengan instansi vertikal di daerah, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah .

1) Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

- a) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Parepare dengan KONI Kota Parepare untuk mencari atlit yang dapat berprestasi di ajang nasional.
- b) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Tentang Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memberikan manfaat kepada warga parepare dalam bentuk hasil dari penelitian yang telah dicapai.
- c) Belanja Hibah Pemerintah Daerah KotaParepare dengan Dharma Wanita Persatuan Kota, untuk memberdayakan dharma wanita persatuan kota dalam kegiatan social.
- d) Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dengan PT. FAJAR AJATAPPARENG tentang Pemanfaatan Lahan Eks Pasar Seni Kota Parepare, untuk meningkatkan PAD Kota Parepare dalam hal bentuk Bangun Guna Serah.

2) Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

Berkaitan dengan koordinasi dengan instansi vertikal yang terdiri dari: Forum Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida), Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) serta Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

Untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, maka telah dibentuk kerjasama dan koordinasi dengan seluruh jajaran pimpinan daerah Kota Parepare. Untuk menjabarkan kegiatan koordinasi, komunikasi dan dialog tersebut dilakukan

dalam Forum Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida). Selain itu, juga telah terbentuk Komunitas Intelegen Daerah (Kominda), serta Kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Parepare periode 2011-2013 dengan tujuan utama pembentukan forum ini adalah untuk terwujudnya optimalisasi hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama masing-masing di Kota Parepare.

3) *Pembinaan Batas Wilayah*

Dalam rangka penentuan batas daerah secara pasti di lapangan sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah, maka perlu dilakukan penegasan batas daerah secara sistematis dan terkoordinasi. Kebijakan yang ditempuh untuk percepatan proses penyelesaian masalah batas wilayah antara Kota Parepare dengan kabupaten Sidrap dan Kota Parepare dengan Kabupaten Pinrang dititikberatkan pada upaya mewujudkan batas wilayah yang jelas dan pasti baik secara yuridis maupun fisik dilapangan. Dengan hal tersebut Pemerintah Kota Parepare menyarankan kepada Pemerintah Provinsi untuk memfasilitasi dan mempertemukan tiga daerah (Pinrang, Sidrap dan Parepare) untuk dibahas bersama. Selanjutnya solusi penyelesaian dibuktikan dengan dokumen sebagai tanda bukti yang dimiliki masing-masing daerah.

4) *Pencegahan dan Penanggulangan Bencana*

Selama tahun 2012 telah terjadi beberapa bencana, seperti angin kencang/putting beliung yang mengakibatkan 318 rumah warga mengalami kerusakan baik rusak berat maupun ringan. Selain itu, juga terjadi bencana kebakaran sebanyak 3 kali yang mengakibatkan 6 rumah warga mengalami kerusakan, sedangkan longsor berdampak pada rusaknya 3 rumah warga. Keseluruhan kejadian yang terjadi selama Tahun 2012 di Kota Parepare ditetapkan sebagai status bencana Tingkat Kota. Untuk penanggulangan dampak bencana dianggarkan anggaran sebesar Rp.450.000.000,- dan yang teralisasi Rp.215.250.000,- sebagai bantuan anggaran untuk perbaikan rumah dan lain-lain peruntukannya.

5) *Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*

Berkenaan dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, sangat disadari bahwa ketentraman dan ketertiban umum merupakan salah satu penentu keberhasilan pembangunan. Kota Parepare sebagai kota yang basis masyarakatnya heterogen mampu menjaga ketentraman dan ketertiban umum dari segala konflik yang berpotensi terjadi. Penguatan komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat, antar pemuka agama, serta peran aktif masyarakat akan terus dikedepankan untuk menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban umum di Kota Parepare.

F. PENUTUP

Capaian kinerja tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang dijelaskan dalam laporan ini, sesungguhnya adalah merupakan kinerja bersama antara eksekutif dan legislatif, karena prosedur yang berlaku sesuai dengan norma yang telah disepakati dan dijalin bersama sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Parepare, masih terdapat banyak kekurangan yang harus segera diatasi dan dibenahi bersama.

Demikian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012 ini kami publikasikan untuk diketahui oleh masyarakat Kota Parepare pada khususnya dan oleh seluruh warga Negara Indonesia pada umumnya. Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan masukan, saran pendapat ataupun tanggapan guna peningkatan

penyelenggaraan pemerintahan ke depan, dapat menyampaikan melalui SMS CENTRE Pengaduan Masyarakat 081-241350077 atau berkunjung langsung pada kantor kami melalui Bagian Hubungan Masyarakat dan atau pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Parepare Jl. Jenderal Sudirman Nomor 78, Telepon 0421-21157 psw. 230, 231,207,214 Fax 0421-21090. Untuk mendapatkan informasi secara mendetail dan selengkapnya mengenai Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Parepare Tahun 2012 dapat dibuka melalui website Pemda Kota Parepare (www.pareparekota.go.id).

Sekian dan Terima Kasih!

Parepare, April 2013

WALIKOTA PAREPARE,

H. SJAMSU ALAM